

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG

2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang periode 2024-2026 merupakan panduan dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, diperlukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada

Dokumen Renstra ini memberikan pedoman bagi semua komponen unit kerja, mulai dari pimpinan sampai dengan staf untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan dinas yaitu "Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah" dan "Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan"

Akhir kata disampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran/masukan dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2024-2026.

Jombang, 06 April 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN PD.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	8
2.2. Sumber daya PD.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan PD	73
BAB III	75
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....	75
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	75
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	80
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	81
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	85
BAB IV.....	86
TUJUAN DAN SASARAN	86
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	86
BAB V.....	88

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB VI.....	90
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	90
BAB VII.....	132
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	132
BAB VIII.....	134
PENUTUP	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	87
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	89
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023	92
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD. Seiring dengan perkembangan perubahan kondisi maupun keadaan yang saat ini terjadi dimana pasca pandemi Covid 19 yang melanda seluruh negara didunia baik negara maju maupun negara berkembang salah satunya adalah Indonesia maka Pemerintah mendapat tugas sekaligus tantangan yang cukup berat untuk melaksanakan pemulihan perekonomian pasca terdampak pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan ditempuh oleh Pemerintah Pusat yang pada akhirnya harus diikuti oleh Pemerintah Daerah mulai dari penguatan keselarasan program kegiatan baik itu indikator maupun target yang harus ditetapkan kembali agar terjadi sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah serta berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah, demikian dalam proses perencanaan sehingga perlu di susun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan program kegiatan agar selaras dan sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada.

Perencanaan merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan teknis penyusunan Renstra PD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka pada bab ini tidak memuat Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan guna mewujudkan sasaran program pembangunan urusan perikanan dan ketahanan pangan selama kurun waktu 2024-2026. Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam periode 3 tahun guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah berbasis agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 harus mempedomani sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi/ketepatan dan sinkronisasi/kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang 2024-2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang yang merupakan

Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pangan Nasional.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah bagian dari RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang setiap tahunnya mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila; 2) landasan konstitusional UUD'45; serta 3) landasan operasional :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4189/keuda Tahun 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 30 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tupoksi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten adalah sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan tiga tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program prioritas serta indikatif pendanaan bagi penyelenggara pemerintah dan pelaksana pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan yang berkualitas yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan stake holder sebagai bahan rujukan pelaksanaan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan agar lebih terarah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;
3. Sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
4. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan serta pemilihan program/kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
 - 3.2 Penentuan Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD
 - 4.2 Cascading Kinerja PD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ketahanan pangan dan perikanan di wilayah kerjanya. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian salah satunya adalah penyesuaian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah agar Kelembagaan Perangkat Daerah lebih sederhana tetapi kaya fungsi. Secara kelembagaan Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tupoksi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Pangan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

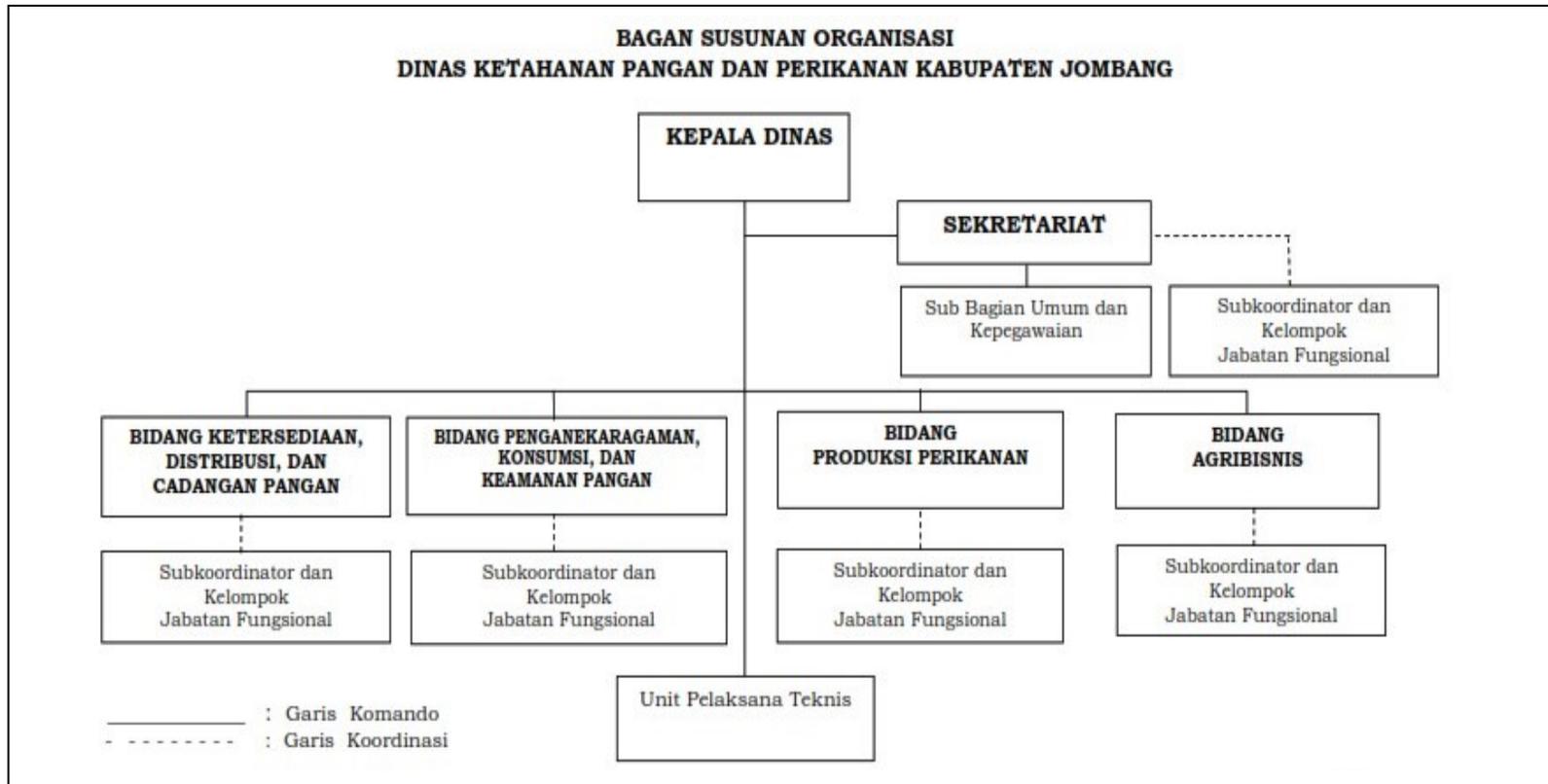
- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi ;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Produksi Perikanan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Agribisnis
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT Budidaya Perikanan Air Tawar

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Sedangkan deskripsi tugas pokok Jabatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Penyusunan Program dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana, dan evaluasi program, dan anggaran rumah tangga serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA),

- Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dilingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKJiP di lingkup Dinas
 - n. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP)
 - o. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1.1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur; Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Cadangan Pangan

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, serta cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

- lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. Pelaksanakan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - g. Pelaksanaan Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan; penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan cadangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - j. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan pemantapan program di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

4. Bidang Produksi Perikanan

Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan sumber daya perikanan, perbenihan, dan kesehatan ikan. Dalam melaksanakan tugas, bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. Penyusunan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan produk di bidang perikanan budidaya;
- c. Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan kelompok masyarakat pengawas;
- d. Penyusunan bahan penyebaran informasi teknologi perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- e. Penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya perikanan;
- f. Pelaksanaan kebijakan penyebaran teknologi perbenihan, pengelolaan

- kesehatan ikan, dan pengendalian obat kimia dan biologis; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

5. Bidang Agribisnis

Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha, kelembagaan, dan penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Agribisnis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pangan lokal;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyebaran informasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha perikanan;
- e. Penyusunan bahan kebijakan peningkatan kelas kelompok perikanan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

6. UPT Budidaya Perikanan Air Tawar

Tugas pokok UPT Budidaya Perikanan Air Tawar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Jombang di bidang pembenihan ikan air tawar di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok UPT Budidaya Perikanan Air Tawar mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan.
- b) Pelaksanaan kegiatan produksi benih dan induk unggul.
- c) Penyelenggaraan kegiatan kaji terap pengembangan perikanan.
- d) Pelaksanaan bimbingan ketrampilan.

- e) Penyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman teknis mengenai pembenihan dalam rangka program penyuluhan.
- f) Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan, dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) Kabupaten Jombang berubah status kepegawaiannya dari PNS Daerah menjadi PNS Pusat dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan untuk Fungsional Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Peraturan Bersama menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 dengan demikian Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang Analisis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan daerah.

2.2.Sumber Daya PD

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan dan perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas.

Berikut komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang :

1. Jabatan

Dari komposisi PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang keseluruhan berjumlah 63 orang yang terdiri dari :

Pejabat Struktural	Jumlah (orang)	
	Laki-laki	Perempuan
Eselon 2	0	1
Eselon 3	1	4
Fungsional		
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan	8	5
Analisis Ketahanan Pangan	2	4
Pengawas Perikanan	0	1
Analisis Pasar Hasil Perikanan	0	1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	0
Pelaksana		
PNS	4	3
Non PNS	18	10

2. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Pangkat	Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
Pembina	IV	1	5
Penata	III	13	13
Pengatur	II	1	2

3. Tingkat Pendidikan

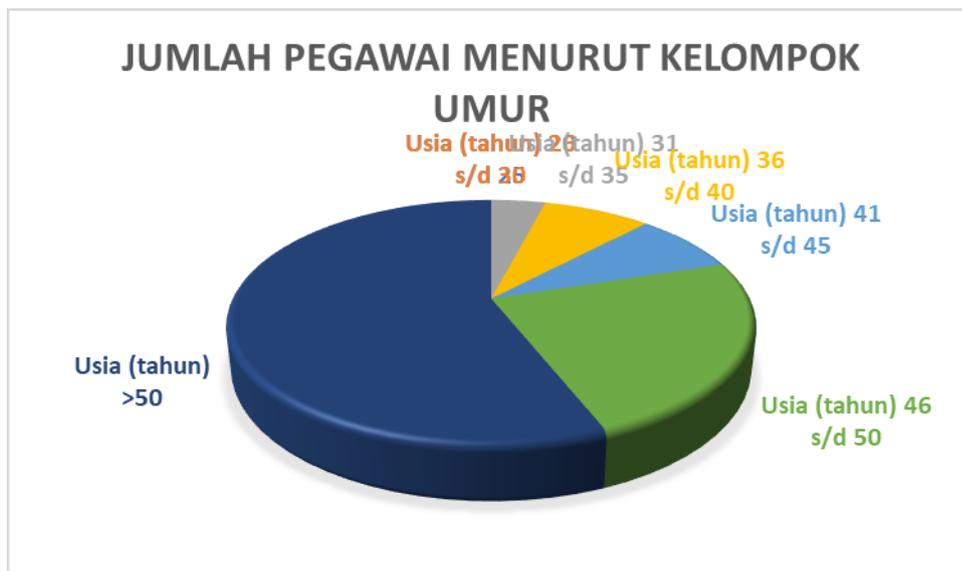
Tingkat pendidikan PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Pendidikan	Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan
S2	1	5
S1	18	21
D3	6	3
SLTA	9	1
SLTP	1	-
SD	-	-

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang merupakan pejabat fungsional tertentu, baik hasil penyetaraan maupun fungsional murni. Jabatan fungsional tertentu pada suatu instansi merupakan pejabat yang khusus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

4. Sebaran Usia

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia, jumlah terbesar tergolong pada kelompok usia >50 tahun sebanyak 14 orang dan kelompok usia 46-50 tahun sebanyak 6 orang. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mayoritas ada pada kelompok usia yang sudah tidak produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sarana Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Mesin Pembuat Pellet	1	1		
2	Transportable Generating Set	1	1		BBI Ngoro
3	Pompa Air	5	3	2	
4	Station Wagon	4	4		
5	Sepeda Motor	34		3	3 proses penghapusan

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
6	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (roda 3)	1	1		
7	PH meter/Quasi Peak Meter / soil ph	24	2	22	22 proses penghapusan
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1		1	proses penghapusan
9	Lemari Besi/Metal	1	1		
10	Lemari Kayu	10	9	1	
11	Rak Kayu	5	2	3	
12	Filing Cabinet Besi	12	10	2	
13	Brandkas	1	1		
14	Lemari Kaca	1	1		
15	White Board	2	2		
16	Alat Penghancur Kertas	1	1		
17	Mesin Absensi	2	1	1	1 proses penghapusan
18	Overhead Projector	9	4	5	1 proses penghapusan
19	Meja Rapat	3	3		
20	Tempat Tidur Kayu	26		26	26 proses penghapusan
21	Kursi Tamu/ sofa	6	5	1	1 proses penghapusan
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1	proses penghapusan
23	Mesin Pemetong Rumput	1		1	
24	Lemari Es	5	5		
25	A.C. Split	23	20	3	2 proses penghapusan
26	Kipas Angin	11	2	9	
27	Televisi	4	1	3	1 proses penghapusan

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
					n
28	Meja 1/2 Biro	59	43	16	
29	Kursi Putar	5	4	1	
30	Kursi Biasa	46	42	4	
31	Kursi Lipat	5	5		
32	Alat Peternakan lainnya mesin kicir merk nangrong	1		1	proses penghapusan
33	Kasur/Spring Bed	10		10	
34	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19	19		
35	Dispenser	5	5		
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	5	2	
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	11		
39	Meja Kerja Pejabat lain-lain/Pembelian meja arsip	1	1		
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	7	2	
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	10	2	
43	Buffet Kaca	2	2		
44	Telephone	4	1	3	
45	Microphone/Wireless MIC	1	1		
46	Camera Electronic	12	3	9	1 proses penghapusan
47	Facsimile	3	1	2	
48	Camero Photo Micrograph	1	1		
49	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	5	1	4	4 proses penghapusan
50	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1		1	proses penghapusan
51	Mikroskop	1	1		

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
52	Secchi Disk (alat laboratorium kualitas air dan tanah)	2	2		
53	P.C Unit	8	3	5	5 proses penghapusan
54	Lap Top/Note Book	44	31	13	12 proses penghapusan
55	Hard Disk	3	1	2	
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	25	28	9 proses penghapusan
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		Gedung ex. perikanan
59	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		Kantor BBI Ngoro
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		Gedung Administrasi SAP
61	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1		1	Pagar BBI Bareng
63	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1		Pagar Pintu Besi
65	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1		tempat ibadah
66	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		Gedung Aula BBI Ngoro
67	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1		1	Aula BBI Bareng
68	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1		Pos Jaga dan Kamar Mandi SAP
69	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1		Pembangunan Pos Jaga BBI Ngoro
70	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		Kolam Ikan BBI Bareng

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
72	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		Kolam Penampungan Air BBI Bareng
73	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		Kolam SAP
74	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		Pembuatan Kolam Pendederan BBI Ngoro
75	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		pembangunan kolam ikan di BBI Ngoro
76	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		Kolam BBI Ngoro
77	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	1		33 kotak (kolam ikan)
78	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1		Bangunan Baliho Demapan
79	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1		Gedung Showroom SAP
80	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1		Rumah Pompa SAP
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1		tempat parkir
82	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1		1	Gedung Asrama BBI Ngoro
83	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	1		
85	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	1		BBI Ngoro
86	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	1		Pembangunan Jaringan Saluran Drainase Air Hujan dan Limbah

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
87	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	1		
88	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1		Tamabah Daya Listrik
89	Jaringan air minum lainnya	1	1		Keg. 20.05 Pembangunan Konstruksi Jar.air BBI Ngoro
90	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1		Jaringan Instalasi Listrik
92	Spineret	1		1	proses penghapusan
93	Unit Penggilingan	1		1	proses penghapusan
94	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	10		10	10 proses penghapusan

Unit Usaha Operasional

Keberadaan unit usaha yang masih dioperasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Kolam Kaji Terap Budidaya Ikan Air Tawar di lingkungan SAP (Sentra Aquabis Perikanan) dan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar

A. UPT Budidaya Perikanan Air Tawar

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, sejak 6 Juni 2018 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Ngoro berubah nomenklatur menjadi UPT Budidaya Perikanan Air Tawar sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang. Sebagai bagian dari Dinas berada dibawah pembinaan bidang produksi dengan tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan

pembenihan dan budidaya ikan, baik kaitannya sebagai penyedia benih ikan bermutu, sebagai sumber informasi terkait kegiatan usaha perikanan yang meliputi pembenihan maupun pembesaran ikan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi UPT, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan pembenihan ikan, guna mendukung pelaksanaan pengembangan perikanan di Kabupaten Jombang.
2. Menghasilkan benih dan calon induk ikan yang berkualitas.
3. Melaksanakan kegiatan pembesaran ikan.

Hasil produksi dari UPT Budidaya Perikanan Air Tawar berupa penjualan benih, penjualan ikan konsumsi maupun penjualan induk-induk afkir setiap tahun disetorkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah).

B. Kolam Kaji Terap Budidaya Ikan di Sentra Aquabis Perikanan (SAP)

Kolam budidaya ikan yang ada di lingkungan Sentra Aquabis Perikanan (SAP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang digunakan sebagai kegiatan kaji terap budidaya ikan air tawar sesuai dengan kaidah teknis budidaya ikan yang benar dengan beberapa jenis komoditi ikan yang dibudidayakan antara lain lele, gurami dan patin. Dalam proses budidaya ikan di SAP tersebut hasil penjualan ikan dari kolam SAP setiap tahun akan disetorkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah).

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dimana Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Bupati/pimpinan daerah melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pangan dan Perikanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang selama periode 2019-2022 telah melaksanakan fungsi pelayanan urusan pangan dan perikanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Urusan Pangan

- Mewujudkan cadangan pangan masyarakat
- Pemantauan stabilitas harga pangan strategis
- Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pangan lokal
- Pengukuran keragaman konsumsi pangan dan ketersediaan pangan wilayah
- Pengukuran neraca pangan wilayah
- Pembuatan peta sistem kewaspadaan pangan dan gizi
- Pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan
- Pengawasan pangan segar asal tumbuhan
- Peningkatan SDM kelompok lumbung, kelompok PUPM, kelompok olahan pangan dan kelompok P2L

2. Pelayanan Urusan Perikanan

- Peningkatan produksi perikanan budidaya
- Peningkatan produksi ikan tangkap
- Peningkatan produksi benih
- Peningkatan produksi olahan hasil perikanan
- Peningkatan konsumsi makan ikan
- Peningkatan sdm pembenih,pembudidaya,nelayan dan poklahsar

Berikut evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang selama kurun 4 tahun terakhir disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Rasio Pangan Daerah		1.7	1.75	N/A	N/A	1.72	1.80	N/A	N/A	101.18	102.86	N/A	N/A
	Persentase Pertumbuhan Cadangan Pangan Masyarakat	%	20	20	N/A	N/A	16.39	20.10	N/A	N/A	81.95	100.50	N/A	N/A
	Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan	%	10	10	N/A	N/A	4.37	2	N/A	N/A	156.30 %	180.00 %	N/A	N/A
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	88	89	N/A	N/A	88.2	83.2	N/A	N/A	100.23	93.48	N/A	N/A
	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	%	80	80	N/A	N/A	80	98.30	N/A	N/A	100.00	122.88	N/A	N/A
	Jumlah Cadangan pangan Masyarakat	Kg/tribulan	736	736	N/A	N/A	710	736.25	N/A	N/A	96.47	100.03	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	(kg/tribulan)													
	Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan	%	92	94	N/A	N/A	92	94	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari	Kal/kap/hr	3,300	3,399	N/A	N/A	3,791	3,723	N/A	N/A	114.88	109.53	N/A	N/A
	Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari	gr/kap/hr	89	92	N/A	N/A	89.08	91.68	N/A	N/A	100.09	99.65	N/A	N/A
	Jumlah kelompok lumbung yang dibina	Kelompok lumbung	50	20	N/A	N/A	50	20	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	unit	2	3	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Gudang Lumbung yang dibangun	unit	3	3	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi sarana prasarana	ton	11	0	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi isi lumbung	Unit	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Gudang Lumbung yang dibangun	Unit	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah rumah RMU yang dibangun	Unit	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah pengadaan RMU	Unit	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah pelaku distribusi pangan yang difasilitasi dalam kemitraan dengan lembaga pangan	Kelompok	2	0	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	pemerintah													
	jumlah pelaku distribusi pangan perberasan	Peserta	200	0	N/A	N/A	200	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Peserta Pembinaan PUPM/TTI	Peserta	40	50	N/A	N/A	50	50	N/A	N/A	125.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen informasi harga, pasokan 9 bahan pokok serta akses pangan	Dokumen	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen data baku pangan, jumlah dokumen NBM, Jumlah dokumen SKPG	Dokumen	3	3	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah peserta rapat dewan ketahanan pangan	Peserta DKP	65	0	N/A	N/A	55	0	N/A	N/A	84.62	0.00	N/A	N/A
	Jumlah peserta rakor sinkronisasi SKPG	Peserta SKPG	120	20	N/A	N/A	120	20	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah desa cukup tahan pangan yang dibina	Desa	9	16	N/A	N/A	9	16	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	jumlah peta rawan pangan yang disusun	Peta rawan pangan	1	0	N/A	N/A	1	-	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah konsumsi energi perkapita perhari	kal/kap/hr	1,869	1,888	N/A	N/A	2,061.7	1,831.5	N/A	N/A	110.31	97.01	N/A	N/A
	Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari	gr/kap/hr	55	56	N/A	N/A	59	56.4	N/A	N/A	107.27	100.71	N/A	N/A
	Persentase pangan segar bebas dari residu kimia	%	86.5	88	N/A	N/A	90.2	97.14	N/A	N/A	104.28	110.39	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA	Peserta	50	120	N/A	N/A	50	120	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pelaksanaan Lomba Cipta Menu tingkat provinsi, Festival Makanan Tradisional dan Festival Makanan Khas Daerah se Bakorwil Bojonegoro	Kali	3	1	N/A	N/A	3	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah sampel pangan segar yang di uji mutu keamanan pangan	Sample	60	60	N/A	N/A	60	60	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan	Peserta	70	25	N/A	N/A	70	25	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah peserta pembinaan mutu keamanan pangan	Peserta	100	20	N/A	N/A	100	20	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Pembinaan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah	2	0	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Kelompok Karangkitri yang dibina	Kelompok karangkitri	3	0	N/A	N/A	3	-	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Kelompok KRPL yang dibina	Kelompok KRPL	5	7	N/A	N/A	5	7	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah sampel survei konsumsi berbasis PPH (Pola Pangan Harapan)	KK	630	630	N/A	N/A	630	630	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah peserta dialog interaktif	Orang	300	0	N/A	N/A	300	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	jumlah peserta sosialisasi hasil surve PPH	Peserta	80	0	N/A	N/A	80	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertifikasi	%	20	40	N/A	N/A	30	43.4	N/A	N/A	150.00	108.50	N/A	N/A
	Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT	%	0.02	0.02	N/A	N/A	0.06	0.03	N/A	N/A	300.00	150.00	N/A	N/A
	Jumlah peserta pembinaan dan magang kerja pelaku olahan pangan lokal	Peserta	132	70	N/A	N/A	132	70	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana prasarana	Kelompok	2	5	N/A	N/A	2	5	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan	Orang	60	0	N/A	N/A	60	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah kelompok dan RTM yang mendapat bantuan sarana produksi perikanan	Kelompok	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
		RTM	20	30	N/A	N/A	20	30	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Sarana Prasarana Budidaya Yang diberikan pada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Ponpes	Paket	0	2	N/A	N/A	0	2	N/A	N/A	0.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah sarana prasarana Tangkap yang diberikan pada kelompok nelayan	Paket	0	2	N/A	N/A	0	2	N/A	N/A	0.00	100.00	N/A	N/A
	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	N/A	4.4	N/A	N/A	N/A	5.92	N/A	N/A	N/A	134.55	N/A	N/A
	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	%	0.3	0.30%	N/A	N/A	0.32	0.10%	N/A	N/A	106.67	33.33	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Nilai tambah produk hasil perikanan (Rupiah)	Rupiah	1.441.795.000	1.081.346.250	N/A	N/A	1.018.969.175	1.065.561.650	N/A	N/A	70.67	98.50	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)	ton	16,370.00	14,800	N/A	N/A	16,370.10	14,801.5	N/A	N/A	100.00	100.01	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Benih di UPT Budidaya perikanan Air Tawar	Ekor	172,500	198,375	N/A	N/A	149,436	221,378	N/A	N/A	86.63	111.60	N/A	N/A
	Jumlah peserta yang mendapat bimtek	pembudiyaya, santri dan nelayan	70	0	N/A	N/A	60	0	N/A	N/A	85.71	0.00	N/A	N/A
	Jumlah Sarana Prasarana Budidaya Yang diberikan pada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Ponpes	Paket	5	1	N/A	N/A	4	1	N/A	N/A	80.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah sarana prasarana Tangkap yang diberikan pada	paket	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	kelompok nelayan													
	Jumlah Kaji Terap yang dilaksanakan di SAP	Ekor	32,000	32,000	N/A	N/A	32,000	37,000	N/A	N/A	100.00	115.63	N/A	N/A
	Jumlah Restocking Benih Ikan	Ekor	110,000	80,000	N/A	N/A	110,000	80,000	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen informasi dan pelaporan perkembangan perikanan	Dokumen	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah pengadaan sarana prasarana perbenihan ikan di UPT budidaya perikanan air tawar	Induk Lele	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A
		Kg Pakan	1,570	4,000	N/A	N/A	540	4,384	N/A	N/A	34.39	109.59	N/A	N/A
	Jumlah UPR yang mengikuti Bimtek	Orang	20	10	N/A	N/A	20	10	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	perbenihan													
	Jumlah Fasilitas Sarana Prasarana Perbenihan	Paket	2	1	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Bimtek pengendalian hama dan penyakit ikan	Orang	20	20	N/A	N/A	20	20	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah uji kualitas air dan ikan pada pembudidaya ikan	kali	20	10	N/A	N/A	16	9	N/A	N/A	120.00 %	110.00 %	N/A	N/A
	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan	kali	20	10	N/A	N/A	18	12	N/A	N/A	90.00	120.00	N/A	N/A
	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perbenihan di UPT budidaya perikanan air	UPT	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	tawar yang dibangun/rehab													
	1. Persentase peningkatan kelas kelompok	%	8.78	9.7	N/A	N/A	8.78	9.7	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
		%	4.73	6.72	N/A	N/A	4.73	4.55	N/A	N/A	100.00	67.71	N/A	N/A
	2. Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB	Orang	18	19	N/A	N/A	15	20	N/A	N/A	83.33	105.26	N/A	N/A
	3. Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	28.89	29.35	N/A	N/A	25.91	28.23	N/A	N/A	89.69	96.18	N/A	N/A
	4. Pertumbuhan Omzet olahan perikanan	%	1.02	0.51	N/A	N/A	0.76	0.39	N/A	N/A	74.51	76.47	N/A	N/A
	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan kelembagaan usaha perikanan	Orang	60	40	N/A	N/A	60	40	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah kelompok yang dinilai kualitas kelembagaan kelompok perikanan	Kelompok	18	18	N/A	N/A	20	25	N/A	N/A	111.11	138.89	N/A	N/A
	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan teknologi budidaya perikanan	Orang	30	40	N/A	N/A	30	40	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan hasil produksi perikanan	Orang	185	145	N/A	N/A	60	145	N/A	N/A	32.43	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Peserta Sosialisasi GEMARIKAN dan Pengenalan Perikanan Bagi Pelajar	Orang	360	0	N/A	N/A	30	0	N/A	N/A	8.33	0.00	N/A	N/A
	Jumlah pelaku usaha pengolahan	Pelaku Usaha	8	6	N/A	N/A	7	6	N/A	N/A	87.50	100.00	N/A	N/A
	hasil perikanan yang mengikuti	Produk	15	15	N/A	N/A	19	15	N/A	N/A	126.67	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	pameran produk dan produk pangan lokal yang dipromosikan													
	Jumlah Peserta Dialog Interaktif Budaya Perikanan	Orang	200	0	N/A	N/A	200	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Huruf	BB	BB	N/A	N/A	BB	BB	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis Layanan	28	26	N/A	N/A	28	26	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Persentase dukungan sarana dan prasarana pelayanan	%	100	100	N/A	N/A	95.29	100	N/A	N/A	95.29	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	30	39	N/A	N/A	30	39	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Unit	21	1	N/A	N/A	21	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	3	0	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	66.67	0.00	N/A	N/A
	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	Unit	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	82	39	N/A	N/A	82	39	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Unit	134	0	N/A	N/A	134	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian olahraga	Org/stel	80	0	N/A	N/A	80	0	N/A	N/A	100.00	0.00	N/A	N/A
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun Sesuai Aturan	%	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen Renstra SKPD	Dokumen	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang telah disusun	Dokumen	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah dokumen LAKIP OPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah laporan kinerja tribulan	Dokumen	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Jumlah data perkembangan ketahanan pangan dan Perikanan	Dokumen	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A
	Persentase Pertumbuhan Konsumsi Pangan	%	N/A	N/A	0.87	0.88	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
	Skor Pola Pangan Harapan	angka	N/A	N/A	83.92	84.65	N/A	N/A	85.06	87.43	N/A	N/A	101.36	103.28
	PERSENTASE PENINGKATAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	%	N/A	N/A	20	0	N/A	N/A	20.07	N/A	N/A	N/A	100.35	N/A
	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	0.60	N/A	N/A	N/A	0.6	N/A	N/A	N/A	100.00
	Jumlah cadangan pangan masyarakat	kg/tribulan	N/A	N/A	883	1,060	N/A	N/A	884	1060.5	N/A	N/A	100.11	100.05
	Jumlah gudang lumbung yang dibangun	Unit	N/A	N/A	1	2	N/A	N/A	1	2	N/A	N/A	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah lantai jemur yang dibangun	M2	N/A	N/A	120	0	N/A	N/A	120	0	N/A	N/A	100.00	0.00
	Jumlah pengadaan RMU	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00
	Jumlah rumah RMU yang dibangun	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100.00	0.00
	Jumlah lantai jemur yang dibangun	Unit	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	50.00
	Jumlah gabah yang dibantukan pada kelompok lumbung	Ton	N/A	N/A	116.1	18.67	N/A	N/A	0	18.67	N/A	N/A	0.00	100.00
	Jumlah sarana yang dibantukan pada kelompok lumbung pangan	Unit	N/A	N/A	9	3	N/A	N/A	9	3	N/A	N/A	100.00	100.00
	PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG	%	N/A	N/A	86% (Energi)	87,76% (Energi)	N/A	N/A	85.93	92.24	N/A	N/A	99.92	112.77
		%	N/A	N/A	100% (Protein)	Protein : 100%	N/A	N/A	101.75	103.25	N/A	N/A	101.75	103.25

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis	%	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	50.00 %	133.33%
	Jumlah dokumen data baku pangan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah dokumen neraca bahan makanan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah dokumen SKPG	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah bantuan sarpras optimalisasi lahan	Paket	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	Jumlah peserta pembinaan optimalisasi lahan	Peserta	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	Jumlah peserta koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan perberasan	Peserta	N/A	N/A	100	210	N/A	N/A	120	210	N/A	N/A	120	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah dokumen informasi harga pasokan 9 bahan pokok serta akses pangan	Dokumen	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
	Jumlah kelompok lumbung yang dibina	Kelompok lumbung	N/A	N/A	30	140	N/A	N/A	30	140	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI	Peserta	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	100
	Angka Konsumsi Pangan	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	N/A	N/A	1.859 dan 57	1.886,86 dan 57	N/A	N/A	2.062,92 dan 58	2.091,43 dan 58,45	N/A	N/A	112 dan 101.8	112.5 dan 102.54
	Jumlah kelompok P2L yang Aktif	Kelompok	N/A	N/A	20	35	N/A	N/A	20	35	N/A	N/A	100	100
	Jumlah dokumen penetapan target konsumsi pangan berbasis PPH	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah kelompok P2L yang dibina	Kelompok P2L	N/A	N/A	20	35	N/A	N/A	20	35	N/A	N/A	100	100
	Jumlah bantuan P2L dan Pengolahan Pangan	Paket	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat provinsi, festival makanan tradisional dan festival makanan khas Daerah se bakorwil bojonegoro	Kali	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA	Peserta	N/A	N/A	80	145	N/A	N/A	80	145	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan	Peserta	N/A	N/A	70	120	N/A	N/A	70	120	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	pangan													
	PERSENTASE DESA SANGAT TAHAN PANGAN	%	N/A	N/A	96.08	98.04	N/A	N/A	96.08	94	N/A	N/A	100	96
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.327	N/A	N/A	0
	Dokumen hasil pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan	Dokumen	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100	0
	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan untuk pemuktahiran dan analisis ketahanan, kerentanan pangan	desa	N/A	N/A	8	0	N/A	N/A	8	0	N/A	N/A	100	0
	Jumlah peta rawan pangan yang disusun	Peta rawan pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persentase desa tahan pangan yang ditangani	%	N/A	N/A	N/A	63	N/A	N/A	N/A	63	N/A	N/A	N/A	100
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
	PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN	%	N/A	N/A	98.5	N/A	N/A	N/A	96.67	N/A	N/A	N/A	98.14	N/A
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	N/A	N/A	N/A	98.5	N/A	N/A	N/A	98	N/A	N/A	N/A	99.49
	Jumlah rekomendasi hasil uji yang ditindaklanjuti	rekomendasi	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah sarana yang disediakan	Jenis	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diuji	Sampel	N/A	N/A	60	60	N/A	N/A	60	60	N/A	N/A	100	100
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	N/A	N/A	5.96	6.01	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	%	N/A	N/A	0.17	0.18	N/A	N/A	0.17	0.18	N/A	N/A	100	100
	PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP	%	N/A	N/A	0.06	0.13	N/A	N/A	0.13	0.13	N/A	N/A	216.67	100.00
	Persentase cakupan kelompok yang terfasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	%	N/A	N/A	5.88	N/A	N/A	N/A	5.88	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	Produksi perikanan tangkap	Ton	N/A	N/A	N/A	150.8	N/A	N/A	N/A	150.8	N/A	N/A	N/A	100
	Dokumen data dan informasi sumber daya ikan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah restocking benih ikan	Ekor	N/A	N/A	70,000	105,000	N/A	N/A	70,000	105000	N/A	N/A	100	100
	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu	paket	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	N/A	N/A	1.75	1.75	N/A	N/A	1.75	1.75	N/A	N/A	100	100
	Jumlah nelayan yang mendapatkan bimtek pengembangan kapasitas	Orang Nelayan	N/A	N/A	10	10	N/A	N/A	10	10	N/A	N/A	100	100
	PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA	%	N/A	N/A	0.17	0.18	N/A	N/A	0.17	0.18	N/A	N/A	100	100
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	N/A	N/A	5	4	N/A	N/A	3.78	3.6	N/A	N/A	75.6	90
	Persentase kelompok	%	N/A	N/A	Pemula : 9.72	Pemula : 9.74	N/A	N/A	9.62	10.24	N/A	N/A	98.97	105.13

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	pembudidayaan ikan yang meningkatkan kelas kelompoknya	%	N/A	N/A	Madya : 6.94	Madya : 7.14	N/A	N/A	6.95	5.85	N/A	N/A	104.14	81.93
	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Peserta	N/A	N/A	105	134	N/A	N/A	105	134	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan kelembagaan usaha perikanan	Peserta	N/A	N/A	50	40	N/A	N/A	40	40	N/A	N/A	80	100
	Jumlah Produksi ikan Budidaya	Ton	N/A	N/A	14,665.8	14,687.9	N/A	N/A	14,676	14,703	N/A	N/A	100.07	100.10
	Jumlah Produksi benih ikan di UPT	Ekor	N/A	N/A	228,131	262,350	N/A	N/A	292,870	440,300	N/A	N/A	128.38	167.83
	Dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah prasarana yang dipenuhi untuk UPT	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	100	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang dibantu	Paket	N/A	N/A	17	7	N/A	N/A	16	7	N/A	N/A	94.12	100.00
	Jumlah pengadaan sarana perbenihan di UPT	Ekor Induk dan Kg Pakan	N/A	N/A	60 dan 1.800	60 dan 2.530	N/A	N/A	82 dan 2.364	60 dan 3.580	N/A	N/A	131.33 dan 136.37	100 dan 141.5
	Jumlah monitoring kesehatan ikan	Kali	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	14	26	N/A	N/A	100	185.714286
	Jumlah uji kualitas air dan ikan pada pembudidayaan ikan	Sampel	N/A	N/A	10	20	N/A	N/A	10	13	N/A	N/A	100	65
	Jumlah kajian yang dilaksanakan di SAP	kali	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan yang disusun	Dokumen	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Nilai Tambah Hasil olahan perikanan	Rp	N/A	N/A	1.113.511.924	1.161.462.199	N/A	N/A	1.195.868.500	1.077.162.555	N/A	N/A	107.4	90.07
	Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan	Kg	N/A	N/A	38,009.02	40,495.59	N/A	N/A	49,866.23	42,829.30	N/A	N/A	131.20	105.76
	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang difasilitasi pemasaran produk	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	75.00
	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan hasil produksi perikanan	Peserta	N/A	N/A	90	200	N/A	N/A	90	200	N/A	N/A	100.00	100.00
	Jumlah peserta sosialisasi gemarikan dan pengenalan perikanan bagi pelajar	Peserta	N/A	N/A	30	100	N/A	N/A	30	125	N/A	N/A	100.00	125.00
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	66	73.39	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada				
							Tahun ke-				Tahun ke-				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		N/A	N/A	BB (76.79)	BB (78.29)	N/A	N/A	BB(76.73)	N/A	N/A	N/A	N/A	99.5	99.5
	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	100
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	100
	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dokumen	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	100	100	100
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Laporan	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup SKPD yang di fasilitasi	Bulan	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	100	100
	Jumlah terbayarnya honor pengelola keuangan	bulan	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	100
	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	Laporan	N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	100	100
	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	Laporan	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun	dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	#VALUE!
	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jenis	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jenis	N/A	N/A	61	59	N/A	N/A	61	59	N/A	N/A	100	100
	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	Jenis	N/A	N/A	13	11	N/A	N/A	13	11	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Orang	N/A	N/A	67	0	N/A	N/A	67	0	N/A	N/A	100	0
	Jumlah volume BBM yang distribusikan	liter	N/A	N/A	N/A	3,542	N/A	N/A	N/A	3,919.15	N/A	N/A	N/A	110.6
	Jumlah pemenuhan barang cetak	Lembar	N/A	N/A	21.241	2,080	N/A	N/A	21.241	4,314	N/A	N/A	100	207.4
	Jumlah pemenuhan barang penggantian	Buku	N/A	N/A	50	8,547	N/A	N/A	50	14,443	N/A	N/A	100	169.0
	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jenis	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100	100
	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	N/A	N/A	35	35	N/A	N/A	35	35	N/A	N/A	100	100
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	200	N/A	N/A	100	200

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	Unit	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	100	100
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	Bulan	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Jenis	N/A	N/A	5	2	N/A	N/A	5	2	N/A	N/A	100	100
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	yang dipelihara													
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	Unit	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	N/A	N/A	36	4	N/A	N/A	36	4	N/A	N/A	100	100
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Unit	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	100	100
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	Gedung	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	50

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada			
							Tahun ke-				Tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Unit	N/A	N/A	84	57	N/A	N/A	84	57	N/A	N/A	100	100
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	%	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	Stel	N/A	N/A	N/A	28	N/A	N/A	N/A	27	N/A	N/A	N/A	96.43

Dari tabel capaian kinerja pada urusan Ketahanan Pangan dapat dijelaskan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator yang memiliki peranan penting mengingat salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dengan dilakukan analisis situasi konsumsi pangan. Situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dari data Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) tahun 2019-2022 secara umum menunjukkan peningkatan skor PPH selama 4 tahun pelaksanaan artinya ada peningkatan keragaman pola konsumsi masyarakat meskipun belum bisa dikategorikan ideal, hal ini disebabkan karena konsumsi masyarakat masih kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta umbi-umbian. Hal ini dikarenakan skor yang dihasilkan pada kelompok tersebut masih dibawah skor ideal sedangkan kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula sudah sesuai skor ideal atau sudah mendekati skor. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan skor Pola Pangan Harapan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19, yang menyebabkan perekonomian dunia, negara dan kabupaten terganggu sehingga berimbas pada menurunnya, tingkat pendapatan masyarakat, pekerjaan masyarakat (maraknya PHK) sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Dengan demikian masyarakat menekan biaya kebutuhan untuk konsumsi, menyebabkan rendahnya keberagaman konsumsi masyarakat kab. Jombang. Upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung peningkatan keberagaman konsumsi adalah melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan mudah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih beragam dan tidak tergantung pada beras. Program/kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberagaman konsumsi adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu alternatif yang diluncurkan pemerintah untuk membantu menyediakan bahan pangan secara mandiri dengan pemanfaatan pekarangan. Dengan demikian masyarakat kabupaten Jombang dapat mengkonsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Untuk indikator Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dilakukan uji pangan segar asal tumbuhan. Meskipun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak memiliki kewenangan secara langsung terkait program kegiatan untuk melakukan intervensi penggunaan bahan – bahan kimia dalam proses budidaya tanaman pangan tersebut akan tetapi dengan adanya kegiatan Uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan kepada pemangku kepentingan dalam menjaga tingkat keamanan pangan serta dapat digunakan sebagai acuan publikasi kepada para petani untuk lebih bertanggung jawab dan bijaksana dalam penggunaan pestisida maupun bahan kimia agar sehingga hasil produksi tanaman pangan tidak membahayakan atau merugikan masyarakat (konsumen). Diharapkan dengan adanya publikasi hasil uji laboratorium kepada stake holder serta OPD terkait, dapat meningkatkan kualitas keamanan bahan pangan segar yang ada di pasaran.

Pada indikator kinerja Persentase pertumbuhan cadangan pangan masyarakat disini yang diukur adalah cadangan pangan yang ada di masyarakat dalam hal ini adalah di kelompok lumbung pangan masyarakat karena Kabupaten Jombang belum memiliki cadangan pangan kabupaten. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gabungan kelompok tani atau kelompok tani dalam hal ini kelompok lumbung pangan, dan berfungsi sebagai *buffer stock* pada saat situasi paceklik, bencana alam atau gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Persentase pertumbuhan cadangan pangan masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan pertumbuhan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat terwujud dengan

adanya upaya untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat antara lain dilakukan pembinaan pada kelompok lumbung pangan, dukungan penyediaan infrastruktur lumbung pangan maupun infrastruktur pendukung kemandirian pangan seperti fasilitasi sarana prasarana maupun bantuan isi lumbung bagi kelompok lumbung pangan. Untuk indikator tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan bahan pangan pokok utama (beras) secara umum tergolong stabil karena koefisien variasi (CV) hasil perhitungan masih dibawah batas ambang aman koefisien variasi standart yang ada untuk komoditi beras sebesar $< 10 \%$. Sehingga sampai dengan tahun 2022 kondisi harga pasokan pangan di kabupaten Jombang masih tergolong dalam kategori aman dengan artian bahwa masih mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat sedangkan tingkat stabilitas harga juga masih dalam kondisi stabil, walaupun pada tribulan ke IV tahun 2022, harga beras mengalami lonjakan yang cukup signifikan untuk beberapa saat sehingga mempengaruhi inflasi secara nasional. Hal ini terjadi karena pada tribulan tersebut, secara nasional belum memasuki masa panen raya sehingga tidak ada produksi padi pada daerah-daerah sentra produksi.

Capaian kinerja pada urusan perikanan dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan budidaya di Kabupaten Jombang pada tahun 2019-2022 selalu meningkat mengalami kenaikan hal ini didukung dengan adanya penambahan luas lahan budidaya dan optimalisasi kegiatan budidaya. Walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan produksi perikanan, yang disebabkan adanya pandemic Covid 19 yang mempengaruhi perekonomian dunia. Akan tetapi pada tahun 2021, produksi perikanan mulai mengalami peningkatan produksi, optimalisasi budidaya perikanan tercapai dengan adanya dukungan program/kegiatan antara lain pengembangan budidaya perikanan berupa fasilitasi sarana prasarana perbenihan maupun budidaya bagi pembudidaya dan UPR, pelaksanaan bimtek budidaya dan perbenihan, pelaksanaan pendataan statistik perikanan secara rutin, fasilitasi rehab sarana prasarana perbenihan di UPT guna menghasilkan benih ikan yang berkualitas,

pemantauan penyakit ikan secara kontinyu. Sedangkan tahun 2020 produksi perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan pembudidaya kesulitan dalam hal penjualan hasil produksi akibat adanya kebijakan-kebijakan terkait pembatasan keluar masuk daerah antar kabupaten/kota, hal ini berdampak pada banyaknya pembudidaya yang menghentikan kegiatan usaha karena keterbatasan modal untuk biaya produksi akibatnya banyak kolam-kolam yang kosong sehingga produksi perikanan sangat turun sampai dengan akhir tahun 2020. Untuk produksi benih di UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Ngoro belum maksimal dibanding kan dengan potensi yang dimiliki meskipun produksi benih meningkat hal ini disebabkan faktor keamanan lingkungan yang kurang mendukung, banyaknya induk-induk yang afkir serta terbatasnya kemampuan SDM Perikanan yang ada di UPT. Untuk produksi benih di UPR dari data yang ada menunjukkan kecenderungan turun hal ini disebabkan karena banyaknya UPR yang tidak memproduksi akibat adanya faktor iklim seperti kemarau panjang, keterbatasan induk berkualitas sehingga telur yang dihasilkan juga belum optimal, keterbatasan jumlah UPR di kabupaten Jombang juga berpengaruh pada produksi benih di UPR dimana Kabupaten Jombang memang berpotensi untuk pengembangan perbenihan akan tetapi karena kegiatan perbenihan butuh ketrampilan dan ketelatenan maka banyak petani ikan yang lebih memilih kegiatan usaha budidaya dibanding dengan kegiatan usaha pembenihan. Sedangkan untuk Produksi Ikan Tangkap tahun 2020 juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya penurunan produktivitas perairan, iklim / cuaca yang ekstrim, terbatasnya alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Adanya permasalahan tersebut maka upaya yang dilakukan melalui program pengembangan perikanan tangkap antara lain adalah fasilitasi sarana prasarana tangkap (alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan), pelaksanaan bimtek penangkapan ikan ramah lingkungan, pelaksanaan *Restocking* (penebaran benih ikan di perairan umum). Untuk Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Jombang cenderung mengalami

kenaikan meski masih dibawah angka konsumsi Provinsi Jawa Timur dan Nasioanl. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan manfaat makan ikan sudah mulai ada tapi masih sangat perlu untuk diberikan edukasi terkait manfaat dan pentingnya makan ikan. Melalui kegiatan publikasi dan kampanye GEMARIKAN serta lomba cipta menu olahan ikan diharapkan dapat terus menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingan konsumsi ikan. Sedangkan untuk jumlah produksi hasil olahan perikanan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena jumlah Poklhasar perikanan masih sedikit bahkan akibat adanya kesulitan pemasaran ada beberapa poklhasar yang sudah tidak aktif atau tidak memproduksi. Terbatasnya jaringan pemasaran masih menjadi kendala utama bagi produk-produk olahan hasil perikanan sehingga menyebabkan produksi poklhasar sebagian besar belum kontinyu dan hanya sebatas pada pesanan (*made by order*).

2.4 Kelompok Sasaran Layanan PD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki kewajiban untuk melakukan layanan kepada masyarakat meliputi kelompok lumbung pangan, kelompok PUPM/TTI, kelompok pengolahan pangan lokal, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pembenihan dan kelompok pengolahan hasil perikanan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Polres Jombang, pengusaha retail modern, agen, distributor dan importir pangan yang ada di wilayah kabupaten Jombang terkiat monitoring distribusi bahan pangan untuk memastikan ketersediaan pangan wilayah. Selain dengan stakeholder terkait, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjaga komunikasi dengan Instansi Pembina baik ditingkat Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Untuk urusan pangan, memiliki keterkaitan penyelenggaraan mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur serta Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan mewujudkan ketahanan pangan wilayah. Selain itu, untuk urusan perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memiliki

keterkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur serta Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia dalam melaksanakan program dan kegiatan mewujudkan peningkatan produksi ikan di wilayah kabupaten Jombang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan tidak lepas dari permasalahan atau kendala dari berbagai dimensi baik itu dipengaruhi faktor eksternal maupun faktor internal sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai faktor akibat adanya potensi atau kekuatan lokal yang belum diberdayakan secara optimal, adanya kelemahan yang belum bisa teratasi, adanya peluang yang belum bisa dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung	Belum optimalnya cadangan pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran kelompok lumbung dalam penyisihan cadangan pangan masih kurang • Kondisi gudang lumbung yang kurang layak • Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan kelompok lumbung pangan masih kurang
2.	Kegiatan kelompok distribusi pangan tidak optimal	Peran kelembagaan distribusi pangan belum optimal	Keterbatasan jumlah kelembagaan distribusi pangan
3.	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Pasca pandemi covid 19 jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan	Masih ada desa rawan pangan di kabupaten Jombang
4.	Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang B2SA	<ul style="list-style-type: none"> • Pola konsumsi masyarakat secara umum masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidrat • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

			optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
5.	Daya saing produk olahan pangan berbasis sumber daya lokal masih lemah	Standarisasi produk, packaging maupun kualitas produk olahan pangan lokal kurang optimal	Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan kelompok
6.	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia	Adanya peredaran produk pangan segar yang mengandung cemaran/residu	Kurangnya kesadaran petani maupun pedagang tentang dampak negatif penggunaan pestisida/obat-obatan kimia
7.	Manajemen kelembagaan kelompok perikanan belum berjalan dengan baik	Kelembagaan Kelompok Perikanan belum Optimal	Jumlah kelompok kelas pemula masih cukup banyak sedangkan jumlah kelompok madya sedikit dan kelas utama tidak ada
8.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten masih rendah	Sosialisasi /kampanye GEMARIKAN belum optimal	Kebiasaan masyarakat untuk konsumsi ikan masih rendah
9.	Kurangnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Produksi Olahan Hasil perikanan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Poklamsar Perikanan masih sedikit • Keterbatasan pemasaran • Keterbatasan sarana pengolahan yang dimiliki Poklamsar
10.	Peningkatan peran UPT dalam menghasilkan benih pada setiap komoditas jenis ikan	Kebutuhan benih ikan yang berkualitas masih cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan berkualitas sebagian besar masih tercukupi dari luar kabupaten Jombang karena dari sisi produksi benih, UPR secara volume sudah mampu memenuhi kebutuhan benih lele akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan benih ikan nila, tombro, gurami, patin dan bawal • Terbatasnya SDM di UPT • Terbatasnya ketersediaan induk yang berkualitas
11.	Tingginya biaya produksi terutama	Produksi Perikanan mengalami penurunan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pembudidaya dengan

	kebutuhan untuk biaya pakan hampir 80 %		<p>pakan pabrikan masih cukup tinggi sedangkan harga pakan pabrikan mahal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembudidaya ikan di kabupaten Jombang didominasi oleh pembudidaya ikan skala kecil • Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya maupun pembenihan yang dimiliki oleh pembudidaya maupun UPR
12.	Keterbatasan jumlah dan kemampuan Petugas yang menangani penyakit ikan	Penanganan Penyakit Ikan belum optimal	Pembudidaya ikan terlambat memberikan laporan kejadian penyakit ikan

Dari identifikasi permasalahan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pelayanan dibidang ketahanan pangan maupun perikanan, antara lain :

1. Penguatan cadangan pangan masyarakat masih belum optimal disebabkan belum optimalnya kegiatan penyesihan cadangan pangan di kelompok lumbung pangan,
2. Kelembagaan pangan baik kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan belum optimal,
3. Penganekaragaman pangan belum optimal terutama penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal,
4. Kualitas keamanan konsumsi pangan masih rendah dimana masih adanya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat,
5. Belum optimalnya publikasi dan promosi terkait diversifikasi dan penganekaragaman pangan dan pangan local yang B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman),
6. Masih adanya desa rawan pangan,
7. Belum optimalnya UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Ngoro,

8. Ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan buatan pabrik masih tinggi,
9. Kurangnya petugas teknis yang memiliki kompetensi terkait penyakit ikan,
10. Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki petani ikan (pembudidaya, pembenih maupun nelayan perairan umum) serta pengolah hasil perikanan,
11. Angka konsumsi ikan kabupaten jombang masih relatif kecil dibanding dengan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional,
12. Belum optimalnya publikasi dan promosi terkait konsumsi ikan,
13. Fasilitasi promosi dan pameran produk olahan belum optimal.

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan antara lain keterbatasan jumlah petugas teknis yang dimiliki perangkat daerah, pelaksanaan tupoksi belum optimal, kelembagaan kelompok (kelompok lumbung, pelaku distribusi pangan, kelompok olahan pangan, kelompok P2L, kelompok pembudidaya ikan, UPR, nelayan dan poklhasar) belum berjalan dengan baik, koordinasi dan sinkronisasi terkait data masih belum optimal, masih lemahnya komitmen penerima program/kegiatan untuk memanfaatkan bantuan secara optimal dan berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendorong.

Adapun faktor-faktor penghambat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya ketersediaan SDM yang kompeten pada urusan pangan dan perikanan
2. Ketergantungan masyarakat akan komoditas beras masih tinggi, sebagai bahan pangan pokok
3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penganeekaragaman pangan yang B2SA
4. Regenerasi pengurus kelompok lumbung masih kurang

5. Pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid 19 yang belum menyeluruh dan optimal, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat
6. Belum optimalnya fasilitasi forum lintas sektor dalam penanganan desa rawan pangan
7. Ketrampilan untuk membuat pakan ikan mandiri masih sangat kurang
8. Belum optimalnya peran dan fungsi UPT Budidaya Air Tawar Ngoro
9. Minimnya SOP terkait penanganan penyakit ikan
10. Minimnya jumlah poklhasar hasil perikanan
11. Kurangnya inovasi pada produk olahan pangan maupun ikan
12. Kurangnya tingkat kesadaran penerima bantuan dalam pelaporan perkembangan kegiatan usaha
13. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pangan dalam menjual produk pangan segar yang aman dan bermutu

Sedangkan faktor pendorong dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Dukungan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD Provinsi
2. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
3. Adanya kelompok lumbung, kelompok pembudidaya ikan, UPR, kelompok olahan pangan maupun olahan perikanan yang aktif
4. Adanya wilayah-wilayah yang tidak mendukung untuk produksi padi secara kontinyu sehingga mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok lumbung pangan yang sangat aktif dalam kegiatan penyesihan cadangan pangan
5. Minat masyarakat untuk berwirausaha bidang perikanan masih cukup tinggi
6. Kebutuhan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan ukm/poklhasar/ industri pengolahan ikan masih cukup tinggi
7. Masih adanya lahan pekarangan yang berpeluang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan, pembenihan, budikdamber (budidaya ikan dalam ember) maupun P2L (Pekarangan Pangan Lestari)
8. Adanya potensi bahan baku lokal yang bisa dikembangkan untuk olahan pangan yang beragam

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap dokumen perencanaan strategis kementerian/lembaga pusat dan dinas provinsi dilakukan agar terdapat konsistensi dan sinkronisasi antara kementerian terkait, dinas provinsi, dan kabupaten/kota.

Pada urusan pangan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan dimana Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah '*Mewujudkan Ketahanan Pangan*' dengan Sasaran yaitu '*Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri*' dan '*Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional*'. Sedangkan Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah '*Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tanaman pangan dan hortikultura)*' dengan Sasaran yaitu '*Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat*'.

Pada urusan perikanan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan dimana salah satunya adalah Tujuan ke- 2 (dua) yaitu '*Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional*' dengan Sasaran yaitu '*Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat*', '*Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*' dan '*Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing*'. Sedangkan Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah '*Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan*' dengan Sasaran yaitu '*Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan*' dan '*Meningkatnya Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan*'.

Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat maupun Provinsi sebagaimana disusun oleh masing-masing lembaga dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang berkaitan dengan urusan pangan dan perikanan yang disusun oleh Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

- Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga seringkali sulit diterapkan di daerah
- Masih sangat terbatasnya sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari segi petugas aparaturnya maupun kelompok sasaran pembangunan
- Keterbatasan dalam proses adopsi teknologi dan informasi secara cepat
- Masih rendahnya produksi perikanan di kabupaten
- Masih rendahnya daya saing produk olahan pangan lokal dan olahan ikan di kabupaten
- Keterbatasan anggaran di daerah dalam mendukung pengembangan pembangunan dibidang pangan dan perikanan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasi bahwa rencana struktur kegiatan wilayah Kabupaten Jombang sampai dengan 20 tahun mendatang direncanakan tetap menjadi wilayah yang didominasi oleh kegiatan pertanian. Rencana struktur kegiatan wilayah Kabupaten Jombang sampai dengan 20 tahun mendatang meliputi : Kegiatan Sektor Pertanian, Kegiatan Sektor Industri, Kegiatan Sektor Perdagangan dan jasa komersial, Kegiatan Sektor Pariwisata, Kegiatan Sektor Transportasi, Kegiatan Pendidikan

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jombang adalah mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan

perdesaan secara seimbang dan bersinergi dengan kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan agribisnis untuk meningkatkan potensi sumberdaya alam khususnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan Peraturan tersebut ruang lingkup ketahanan pangan dan perikanan masuk pada wilayah rencana struktur ruang kawasan pengembangan sistem agropolitan, dimana salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra pengembangan produk pangan olahan dengan berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan untuk pola ruang wilayah pada kawasan terpadu yang dikelola sebagai pengembangan wilayah sentra produksi perikanan terpadu dalam rangka pengembangan ketahanan pangan masyarakat. Terkait dengan urusan Perikanan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria :

- a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan
- b. Sesuai dngan kebutuhan industri pengolahan hasil perikanan
- c. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup
- d. Memiliki potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan
- e. Memiliki potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu

Adapun kawasan **peruntukan perikanan** ditetapkan dengan ketentuan Pengembangan sentra perikanan yang berada **di Kecamatan Diwek, Ngoro, Perak dan Bandar Kedungmulyo**. Akan tetapi dengan berkembangnya sektor perikanan maka tidak menutup kemungkinan kecamatan lain akan berpotensi dalam pengembangan perikanan.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut :

N O.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian.	Masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumber daya lokal	Lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	Adanya potensi keanekaragaman pangan lokal
2.	Pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang	Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)	Konsumsi pangan yang kurang beranekaragam yang belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Adanya program/kegiatan pengembangan P2L
3.	Penetapan rencana Pengembangan dan Rehabilitasi Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sektor perikanan	1. Tidak semua wilayah di Kabupaten Jombang memiliki potensi perikanan 2. Menurunnya produktivitas perairan umum	Pemetaan potensi perikanan berdasarkan jenis komoditi ikan dan pemetaan wilayah potensi pengolahan hasil perikanan masih belum optimal	Minat masyarakat terhadap usaha budidaya ikan masih cukup tinggi

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor ketahanan pangan dan perikanan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDH-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Berikut Gambaran permasalahan berkaitan dengan kajian lingkungan sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

NO.	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) 2. Angka Konsumsi Ikan kabupaten masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Alih fungsi lahan 2. Keterbatasan SDM 3. Keterbatasan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk P2L 2. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi
2.	Meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas Perikanan belum optimal 2. Permasalahn penyakit ikan masih sering dihadapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan obat-obatan kimia dalam kegiatan budidaya 2. Ketergantungan pada pakan buatan pabrik 3. Minimnya SDM Teknis yang membidan 4. Menurunnya kualitas perairan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Sertifikasi CBIB dan CPIB 2. Adanya dukungan anggaran untuk memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana usaha perikaan yang dibutuhkan oleh kelompok 3. Adanya kegiatan Restocking pada perairan umum

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan yang ada disandingkan dengan hasil telaah terhadap Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, telaah RTRW dan KLHS, maka diperoleh gambaran isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Urusan Pangan

1. Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung
2. Kegiatan kelompok distribusi pangan tidak optimal
3. Peningkatan ketersediaan informasi harga dan pasokan serta stabilitas harga yang up to date, cepat dan memenuhi standar
4. Peningkatan penanganan kerawanan pangan
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA
5. Daya saing produk olahan pangan berbasis sumber daya lokal masih lemah
6. Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia

Urusan Perikanan

1. Manajemen kelembagaan kelompok perikanan belum berjalan dengan baik
2. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten masih rendah
3. Kurangnya daya saing produk olahan hasil perikanan
4. Peningkatan peran UPT dalam menghasilkan benih pada setiap komoditas jenis ikan
5. Tingginya biaya produksi terutama kebutuhan untuk biaya pakan hampir 80 %
6. Keterbatasan jumlah dan kemampuan Petugas yang menangani penyakit ikan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis PD

Dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang mempunyai tujuan, yaitu :

1. *Meningkatkan Jumlah, Kualitas dan Akses Pangan Masyarakat Perikanan*
2. *Meningkatkan PDRB Sektor*
3. *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi*

Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, yaitu :

1. *Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat*
2. *Meningkatnya Produksi Perikanan*
3. *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah*

Tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut adalah sangat mendukung Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Tujuan ke- 4 (empat) “**Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan**” dengan sasaran ke- 12 (dua belas) “**Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan**” dimana mendukung Misi Ke-1 dan Misi ke-3 (tiga) yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional dan Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri**”. Dengan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang masih kelaparan artinya ketersediaan pangan, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan masyarakat dapat terjamin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga dikatakan penduduk miskin jika penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Selain mendukung pengentasan kemiskinan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga diharapkan mampu memberikan peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang artinya produksi perikanan baik budidaya, perbenihan, tangkap maupun olahan ikan mampu menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jombang.

**TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan jumlah, kualitas dan akses pangan masyarakat		Persentase pertumbuhan konsumsi pangan	3.1	1.2	1.3	1.4
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87,43	88	89.05	90.02
2	Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	1.94	2.85	2.93	3.01
		Meningkatnya produksi perikanan	Persentase pertumbuhan produksi ikan	0.186%	0.20%	0.21%	0.22%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	75.79	69	72	75
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,82)	A (81,49)	A (82,30)	A (83,12)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan tujuan sasaran perangkat daerah serta mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Jumlah, Kualitas dan Akses Pangan Masyarakat	1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatkan Cadangan Pangan Masyarakat	Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
		2. Meningkatkan pemantauan Stabilitas pasokan dan harga pangan strategis	Peningkatan pemantauan Stabilitas harga pangan strategis di tingkat produsen dan tingkat pedagang (grosir dan eceran)
		3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan pangan yang B2SA berbasis sumber daya lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Peningkatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
		4. Meningkatkan Pelaksanaan Uji Pangan Segar Asal tumbuhan	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar
		5. Meningkatkan Pembinaan dan Monitoring desa hasil peta FSVA	Peningkatan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan
2. Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan	2. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan	1. Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya 2. Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap
		2. Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Olahan Perikanan	1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan pelayanan masyarakat yang inovatif dan prima	Penataan kelembagaan dan pelayanan publik Perangkat Daerah yang berkualitas dan berdaya saing

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 – 2026 meliputi Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026 Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas. Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026 mengacu pada tema pembangunan RKPD tahun 2024 yaitu PembangunanInfrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan pada prioritas ketiga, yaitu Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Produk Unggulan Daerah. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Kemandirian Pangan Bio Energi. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan kabupaten Jombang serta bio energi, melalui 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan serta pemanfaatan limbah kotoran hewan ternak sebagai energi terbarukan. Pada tahun 2024 kegiatan

kemandirian pangan bio energi akan dilaksanakan pada 4 (empat) lokasi khusus *pilot project* yaitu pada Desa Made, Kecamatan Kudu; Desa Wonosalam, Wonomerto dan Jarak, Kecamatan Wonosalam.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tersaji sebagaimana Tabel 6.1 dibawah ini :

**Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Jombang**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatkan jumlah, kualitas dan akses pangan masyarakat	Persentase pertumbuhan konsumsi pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan			88.00	2,896,998,750	89.05	1,468,673,500	90.02	1,485,215,500	90.02	5,850,887,750
				PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	0.85	875,074,000	0.99	318,000,000	1.15	230,000,000	1.15	1,423,074,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat	1,476	875,074,000	1,712	318,000,000	1,986	230,000,000	1,986	1,423,074,000
				Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	-		-		-			-
				Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	-		-		-			-
				Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 unit	875,074,000	2 unit	318,000,000	3 unit	230,000,000	10 unit	1,423,074,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)	88.34%	1,615,029,500	89.36%	772,078,000	90.52%	841,120,000	90.52%	3,228,227,500
					Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)	100%		100%		100%		100%	-
				Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis	4%	1,105,505,500	4%	269,500,000	4%	280,500,000	4%	1,655,505,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Laporan	47,791,200	13 Laporan	40,000,000	13 Laporan	50,000,000	39 dokumen	137,791,200
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	706,060,100	3 Laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	9 laporan	806,060,100
				Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	118,839,300	12 Dokumen	65,000,000	12 Dokumen	65,000,000	36 dokumen	248,839,300
				Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	62 Unit	59,599,900	32 Unit	20,000,000	34 Unit	21,000,000	96 unit	100,599,900
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	140 keluarga	173,215,000	280 keluarga	94,500,000	280 keluarga	94,500,000	700 keluarga	362,215,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan skor PPH Ideal	13 kecamatan	509,524,000	13 kecamatan	502,578,000	15 kecamatan	560,620,000	15 kecamatan	1,572,722,000
				Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	122,000,000	1 Dokumen	134,200,000	1 Dokumen	147,620,000	3 dokumen	403,820,000
				Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	387,524,000	5 Laporan	368,378,000	5 Laporan	413,000,000	15 laporan	1,168,902,000
				PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	0%	294,299,750	0%	250,000,000	0%	300,000,000	0	844,299,750

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Dokumen analisa hasil pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen (dokumen analisa)	147,683,750	1 Dokumen (dokumen analisa)	175,000,000	1 Dokumen (dokumen analisa)	200,000,000	3 dokumen	522,683,750
				Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen (peta)	147,683,750	1 Dokumen (peta)	175,000,000	1 Dokumen (peta)	200,000,000	3 dokumen	522,683,750
				Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	6 desa	146,616,000	14 desa	75,000,000	20 desa	100,000,000	20 desa	321,616,000
				Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 Laporan (per tri bulan)	146,616,000	14 Laporan	75,000,000	20 Laporan	100,000,000	20 laporan	321,616,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel uji yang aman	98.33%	112,595,500	98.77%	128,595,500	99.21%	114,095,500	99.21%	355,286,500
				Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan segar asal tumbuhan yang ditindaklanjuti	63 rekomendasi (21 kec x 3 sampel)	112,595,500	84 rekomendasi (21 kec x 4 sampel)	128,595,500	105 rekomendasi (21 kec x 5 sampel)	114,095,500	252 rekomendasi	355,286,500
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	41,050,600	4 laporan	57,050,600	4 laporan	42,050,600	12 laporan	140,151,800
				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71,544,900	2 Dokumen	71,544,900	2 Dokumen	72,044,900	6 dokumen	215,134,700

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase pertumbuhan produksi ikan			0.20%	Rp. 1,571,045,600.00	0.21%	Rp. 2,185,950,500	0.22%	Rp. 2,479,950,500	0.22%	Rp. 6,236,946,600
				PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	0.14%	Rp. 66,855,000	0.15%	Rp. 101,000,000	0.16%	Rp. 115,000,000	0.16%	Rp. 282,855,000
				Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap	151.2 ton	Rp. 60,726,000	151.38 ton	Rp. 90,000,000	151.56 ton	Rp. 102,000,000	151.15 ton	Rp. 252,726,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5,146,500	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	3 dokumen	15,146,500
				Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	55,579,500	2 Unit	85,000,000	2 Unit	97,000,000	6 unit	237,579,500
				Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	1.75%	6,129,000	3.50%	11,000,000	5.24%	13,000,000	5.24%	30,129,000
				Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	6,129,000	20 Orang	11,000,000	30 Orang	13,000,000	60 orang	30,129,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0.20%	1,162,699,500	0.21%	1,619,950,500	0.22%	1,829,950,500	0.22%	4,612,600,500
				Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Produksi ikan Budidaya	14,760.26 ton	1,012,699,500	14,791.26 ton	1,444,950,500	14,823.8 ton	1,629,950,500	44,372.32 ton	4,087,600,500
					Jumlah Produksi benih ikan di UPT	432,500 ekor		473,500 ekor		519,000 ekor		1,425,000 ekor	
				Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	183,622,600	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	250,000,000	6 dokumen	658,622,600
				Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	591,937,000	7 Unit	950,000,000	7 Unit	1,100,000,000	20 unit	2,641,937,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	25,855,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	3 dokumen	95,855,000
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Sub Kegiatan baru di th 2024)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	278 orang	211,284,900	190 orang	234,950,500	210 orang	244,950,500	678 orang	691,185,900
				Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya	25 kelompok	150,000,000	30 kelompok	175,000,000	35 kelompok	200,000,000	35 kelompok	525,000,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 kelompok	150,000,000	30 kelompok	175,000,000	35 kelompok	200,000,000	35 kelompok	525,000,000
				PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai tambah hasil olahan perikanan (Rp)	1,264,085,793	341,491,100	1,318,759,113	465,000,000	1,373,432,433	535,000,000	3,956,277,339	1,341,491,100
				Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (KG)	45,079.29	341,491,100	47,176.42	465,000,000	49,273.55	535,000,000	141,529.26	1,341,491,100

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton)	0,6 ton	116,421,000	0,75 ton	100,000,000	0,9 ton	110,000,000	0.9 ton	326,421,000
				Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota (Pelaku usaha)	180 Pelaku Usaha	225,070,100	240 Pelaku Usaha	365,000,000	300 Pelaku Usaha	425,000,000	300 pelaku usaha	1,015,070,100
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			A (81,49)	6,428,565,690	A (82,30)	7,217,401,175	A (83,12)	6,557,350,175	A (83,12)	20,203,317,040

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6,428,565,690	100%	7,217,401,175	100%	6,557,350,175	100%	20,203,317,040
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	27,099,000	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	82,099,000
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,456,500	3 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	10,000,000	7 dokumen	35,456,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16,642,500	5 Laporan	15,000,000	5 Laporan	15,000,000	15 laporan	46,642,500
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5,103,002,975	100%	5,087,939,175	100%	5,087,939,175	1	15,278,881,325
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	14,765,817,525
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	176,064,000	4 dokumen	161,000,000	4 dokumen	161,000,000	16 dokumen	498,064,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,940,000	1 Laporan	1,940,000	1 Laporan	1,940,000	3 laporan	5,820,000
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	18 Laporan	3,059,800	18 Laporan	3,060,000	18 Laporan	3,060,000	54 laporan	9,179,800

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	30,000,000	100%	36,900,000	100%	50,900,000	100%	117,800,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	75 paket (pakaian Olahraga)	30,000,000	82 paket (pakaian Olahraga)	36,900,000	117 Paket (82 Pakaian Olah raga dan 35 PDH)	50,900,000	274 paket	117,800,000
				Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	445,731,315	100%	508,000,000	100%	568,000,000	100%	1,521,731,315
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,200	1 paket	25,000,000	1 paket	35,000,000	1 paket	75,000,200

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	49,998,115	3 paket	60,000,000	3 paket	70,000,000	3 paket	179,998,115
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11,142,000	2 paket	20,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	61,142,000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	177,674,000	2 paket	193,000,000	2 paket	203,000,000	2 paket	573,674,000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	17,006,500	2 paket	25,000,000	2 paket	35,000,000	2 paket	77,006,500
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	74,900,000	2 dokumen	85,000,000	2 dokumen	95,000,000	2 dokumen	254,900,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100,010,500	40 laporan	100,000,000	40 laporan	100,000,000	120 laporan	300,010,500
				Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	96,283,400.00	100%	58,733,000.00	100%	59,682,000.00	100%	214,698,400
				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit (3 Unit Sofa, 5 AC Split, 2 Standing AC)	96,283,400.00	15 unit (5 unit printer, 10 unit lemari besi)	58,733,000	6 unit laptop	59,682,000	31 unit	214,698,400
				Pengadaan Kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	393,120,000	100%	462,000,000	100%	462,000,000	100%	1,317,120,000
				Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162,000,000	12 laporan	162,000,000	12 laporan	162,000,000	12 laporan	486,000,000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	231,120,000	12 laporan	300,000,000	12 laporan	300,000,000	12 laporan	831,120,000
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	333,329,000	100%	1,033,829,000	100%	303,829,000	100%	1,670,987,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	60,000,000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	165,969,000	36 unit	165,969,000	36 unit	165,969,000	36 unit	497,907,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	70,000,000	2 gedung	970,000,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit	47,360,000	81 unit	47,860,000	81 unit	47,860,000	81 unit	143,080,000

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang (Penyesuaian Kepmen 900.1.15.5-1317)

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatkan jumlah, kualitas dan akses pangan masyarakat	Persentase pertumbuhan konsumsi pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan			88.00	2,896,998,750	89.05	1,468,673,500	90.02	1,485,215,500	90.02	5,850,887,750

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026		
						2024		2025		2026		K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	0.85	875,074,000	0.99	318,000,000	1.15	230,000,000	1.15	1,423,074,000	
				Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat	1,476	875,074,000	1,712	318,000,000	1,986	230,000,000	1,986	1,423,074,000	
					Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	-		-		-			-
					Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	-		-		-			-

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 unit	875,074,000	2 unit	318,000,000	3 unit	230,000,000	10 unit	1,423,074,000
				PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)	88.34%	1,615,029,500	89.36%	772,078,000	90.52%	841,120,000	90.52%	3,228,227,500
					Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)	100%		100%		100%		100%	-
				Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis	4%	1,105,505,500	4%	269,500,000	4%	280,500,000	4%	1,655,505,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Laporan	47,791,200	13 Laporan	40,000,000	13 Laporan	50,000,000	39 dokumen	137,791,200
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	706,060,100	3 Laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	9 laporan	806,060,100
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	118,839,300	12 Dokumen	65,000,000	12 Dokumen	65,000,000	36 dokumen	248,839,300
				Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	62 Unit	59,599,900	32 Unit	20,000,000	34 Unit	21,000,000	96 unit	100,599,900
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	140 keluarga	173,215,000	280 keluarga	94,500,000	280 keluarga	94,500,000	700 keluarga	362,215,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan skor PPH Ideal	13 kecamatan	509,524,000	13 kecamatan	502,578,000	15 kecamatan	560,620,000	15 kecamatan	1,572,722,000
				Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	122,000,000	1 Dokumen	134,200,000	1 Dokumen	147,620,000	3 dokumen	403,820,000
				Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	387,524,000	5 Laporan	368,378,000	5 Laporan	413,000,000	15 laporan	1,168,902,000
				PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	0%	294,299,750	0%	250,000,000	0%	300,000,000	0	844,299,750

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Dokumen analisa hasil pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen (dokumen analisa)	147,683,750	1 Dokumen (dokumen analisa)	175,000,000	1 Dokumen (dokumen analisa)	200,000,000	3 dokumen	522,683,750
				Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen (peta)	147,683,750	1 Dokumen (peta)	175,000,000	1 Dokumen (peta)	200,000,000	3 dokumen	522,683,750
				Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	6 desa	146,616,000	14 desa	75,000,000	20 desa	100,000,000	20 desa	321,616,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	6 Laporan (per tri bulan)	146,616,000	14 Laporan	75,000,000	20 Laporan	100,000,000	20 laporan	321,616,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel uji yang aman	98.33%	112,595,500	98.77%	128,595,500	99.21%	114,095,500	99.21%	355,286,500
				Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan segar asal tumbuhan yang ditindaklanjuti	63 rekomend asi (21 kec x 3 sampel)	112,595,500	84 rekomend asi (21 kec x 4 sampel)	128,595,500	105 rekomend asi (21 kec x 5 sampel)	114,095,500	252 rekomendas i	355,286,500
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	41,050,600	4 laporan	57,050,600	4 laporan	42,050,600	12 laporan	140,151,800
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	71,544,900	2 Dokumen	71,544,900	2 Dokumen	72,044,900	6 dokumen	215,134,700

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase pertumbuhan produksi ikan			0.20%	1,571,045,600.00	0.21%	2,185,950,500	0.22%	2,479,950,500	0.22%	6,236,946,600
				PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	0.14%	66,855,000	0.15%	101,000,000	0.16%	115,000,000	0.16%	282,855,000
				Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap	151.2 ton	60,726,000	151.38 ton	90,000,000	151.56 ton	102,000,000	151.15 ton	252,726,000
				Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5,146,500	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	3 dokumen	15,146,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	55,579,500	2 Unit	85,000,000	2 Unit	97,000,000	6 unit	237,579,500
				Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	1.75%	6,129,000	3.50%	11,000,000	5.24%	13,000,000	5.24%	30,129,000
				Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	6,129,000	20 Orang	11,000,000	30 Orang	13,000,000	60 orang	30,129,000
				PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0.20%	1,162,699,500	0.21%	1,619,950,500	0.22%	1,829,950,500	0.22%	4,612,600,500
				Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Produksi ikan Budidaya	14,760.26 ton	1,012,699,500	14,791.26 ton	1,444,950,500	14,823.8 ton	1,629,950,500	44,372.32 ton	4,087,600,500
					Jumlah Produksi benih ikan di UPT	432,500 ekor		473,500 ekor		519,000 ekor		1,425,000 ekor	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	183,622,600	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	250,000,000	6 dokumen	658,622,600
				Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	591,937,000	7 Unit	950,000,000	7 Unit	1,100,000,000	20 unit	2,641,937,000
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	25,855,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	3 dokumen	95,855,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Sub Kegiatan baru di th 2024)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	278 orang	211,284,900	190 orang	234,950,500	210 orang	244,950,500	678 orang	691,185,900
				Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya	25 kelompok	150,000,000	30 kelompok	175,000,000	35 kelompok	200,000,000	35 kelompok	525,000,000
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 kelompok	150,000,000	30 kelompok	175,000,000	35 kelompok	200,000,000	35 kelompok	525,000,000
				PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai tambah hasil olahan perikanan (Rp)	1,264,085,793	341,491,100	1,318,759,113	465,000,000	1,373,432,433	535,000,000	3,956,277,339	1,341,491,100

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi hasil Olah Perikanan (KG)	45,079.29	341,491,100	47,176.42	465,000,000	49,273.55	535,000,000	141,529.26	1,341,491,100
				Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton)	0,6 ton	116,421,000	0,75 ton	100,000,000	0,9 ton	110,000,000	0,9 ton	326,421,000
				Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota (Pelaku usaha)	180 Pelaku Usaha	225,070,100	240 Pelaku Usaha	365,000,000	300 Pelaku Usaha	425,000,000	300 pelaku usaha	1,015,070,100

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			A (81,49)	6,428,565,690	A (82,30)	7,217,401,175	A (83,12)	6,557,350,175	A (83,12)	20,203,317,040
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6,428,565,690	100%	7,217,401,175	100%	6,557,350,175	100%	20,203,317,040
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	27,099,000	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	82,099,000
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,456,500	3 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	10,000,000	7 dokumen	35,456,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16,642,500	5 Laporan	15,000,000	5 Laporan	15,000,000	15 laporan	46,642,500
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5,103,002,975	100%	5,087,939,175	100%	5,087,939,175	1	15,278,881,325
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	4,921,939,175	28 orang/bulan	14,765,817,525
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	176,064,000	4 dokumen	161,000,000	4 dokumen	161,000,000	16 dokumen	498,064,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,940,000	1 Laporan	1,940,000	1 Laporan	1,940,000	3 laporan	5,820,000
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	3,059,800	18 Laporan	3,060,000	18 Laporan	3,060,000	54 laporan	9,179,800
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	30,000,000	100%	36,900,000	100%	50,900,000	100%	117,800,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	75 paket (pakaian Olahraga)	30,000,000	82 paket (pakaian Olahraga)	36,900,000	117 Paket (82 Pakaian Olah raga dan 35 PDH)	50,900,000	274 paket	117,800,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	445,731,315	100%	508,000,000	100%	568,000,000	100%	1,521,731,315
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,200	1 paket	25,000,000	1 paket	35,000,000	1 paket	75,000,200
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	49,998,115	3 paket	60,000,000	3 paket	70,000,000	3 paket	179,998,115
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11,142,000	2 paket	20,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	61,142,000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	177,674,000	2 paket	193,000,000	2 paket	203,000,000	2 paket	573,674,000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	17,006,500	2 paket	25,000,000	2 paket	35,000,000	2 paket	77,006,500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	74,900,000	2 dokumen	85,000,000	2 dokumen	95,000,000	2 dokumen	254,900,000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100,010,500	40 laporan	100,000,000	40 laporan	100,000,000	120 laporan	300,010,500
				Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	96,283,400.00	100%	58,733,000.00	100%	59,682,000.00	100%	214,698,400
				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit (3 Unit Sofa, 5 AC Split, 2 Standing AC)	96,283,400.00	15 unit (5 unit printer, 10 unit lemari besi)	58,733,000	6 unit laptop	59,682,000	31 unit	214,698,400
				Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	393,120,000	100%	462,000,000	100%	462,000,000	100%	1,317,120,000
				Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162,000,000	12 laporan	162,000,000	12 laporan	162,000,000	12 laporan	486,000,000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	231,120,000	12 laporan	300,000,000	12 laporan	300,000,000	12 laporan	831,120,000
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	333,329,000	100%	1,033,829,000	100%	303,829,000	100%	1,670,987,000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	60,000,000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2026	
						2024		2025		2026		K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	165,969,000	36 unit	165,969,000	36 unit	165,969,000	36 unit	497,907,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	70,000,000	2 gedung	970,000,000
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 unit	47,360,000	81 unit	47,860,000	81 unit	47,860,000	81 unit	143,080,000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Arah pembangunan Kabupaten Jombang menekankan pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Renstra untuk periode pembangunan 2024-2026, jika disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang yang secara langsung mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran seperti terlihat pada tabel 7.1, berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	2024	2025	2026	
Urusan Pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan	-	88	89.05	90.02	90.02
2	Persentase cadangan pangan masyarakat		0.85%	0.99%	1.15%	1.15%
3	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)		88.34%	89.36%	90.52%	90.52%
4	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)		100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan		0%	0%	0%	0%
6	Persentase sampel uji yang aman		96.67%	96.67%	96.67%	96.67%
Urusan Perikanan						
1	Persentase pertumbuhan produksi ikan		0.20%	0.21%	0.22%	0.22%

2	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap		0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
3	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya		0.20%	0.21%	0.22%	0.22%
4	Nilai tambah hasil olahan perikanan		1,264,085,793	1,318,759,113	1,373,432,433	3,956,277,339

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun sinergis dengan dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 3 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan maupun dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan perikanan dapat tercapai dengan mengacu pada ketetapan RPD.

Dengan demikian hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat.